

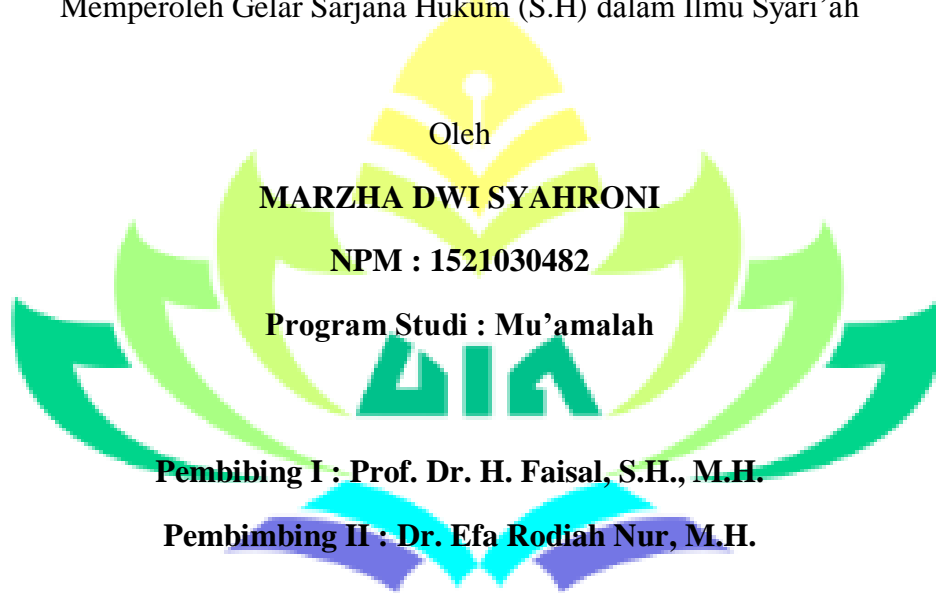
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN DI ATAS
BAGAN**

(Studi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

MARZHA DWI SYAHRONI

NPM : 1521030482

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/ 2019 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN DI ATAS
BAGAN**

**(Studi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung
Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

MARZHA DWI SYAHRONI

NPM : 1521030482

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/ 2019 M

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan cara tidak melanggar ketentuan syariat islam yang berdasarkan suka sama suka antara penjual dan pembeli yang melalui ijab dan qobul yang jelas baik itu berupa ucapan atau perbuatan yang mana jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun sejauh ini ada beberapa jual beli yang belum jelas diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya jual beli tersebut, seperti praktik jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan yang terjadi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, karena terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan adanya jual beli ikan di atas bagan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli ikan di atas bagan apung yang terjadi di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan apung di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli ikan di atas bagan apung yang terjadi di Desa Merak Belantung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Merak Belantung dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan yang terjadi di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dilihat dari pandangan hukum Islam yaitu termasuk dari jual beli *fudhul* karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli dalam transaksi tersebut. Terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh pengelola bagan terhadap pemilik bagan. Dalam praktik jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan yang terjadi di Desa Merak Belantung, termasuk dari *thalaqi al-ruqban* yang dimana jual beli tersebut terlarang dikarenakan penjual menjual barangnya belum sampai di pasar. Maka jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan tersebut merupakan jual beli yang terlarang

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marzha Dwi Syahroni

NPM : 1521030482

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan di Atas Bagan (studi kasus di Desa Merak Balantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2019


Marzha Dwi Syahroni
1521030482





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Marzha Dwi Syahroni

NPM : 1521030482

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan di Atas Bagan" (Studi di Desa Merak Belantung, kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP. 195512251985031002.


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002.

Ketua Prodi Muamalah


Khouruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan di Atas Bagan** (Studi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan). Disusun oleh **Marzha Dwi Syahroni**, Npm 1521030482, Jurusan Mu'amalah, Telah diujikan dalam sidang Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Jum'at, 16 Agustus 2019 Ruang Sidang PPS Fakultas Syari'ah.

TIM MUNAQSAH

| | | |
|-------------------|---|--|
| Ketua | : Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H | (..... ) |
| Sekretaris | : Juhratul Khulwah, M.S.I. | (..... ) |
| Penguji I | : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. | (..... ) |
| Penguji II | : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. | (..... ) |

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: “dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”. (QS. At-Thalaq, 65: 3).¹

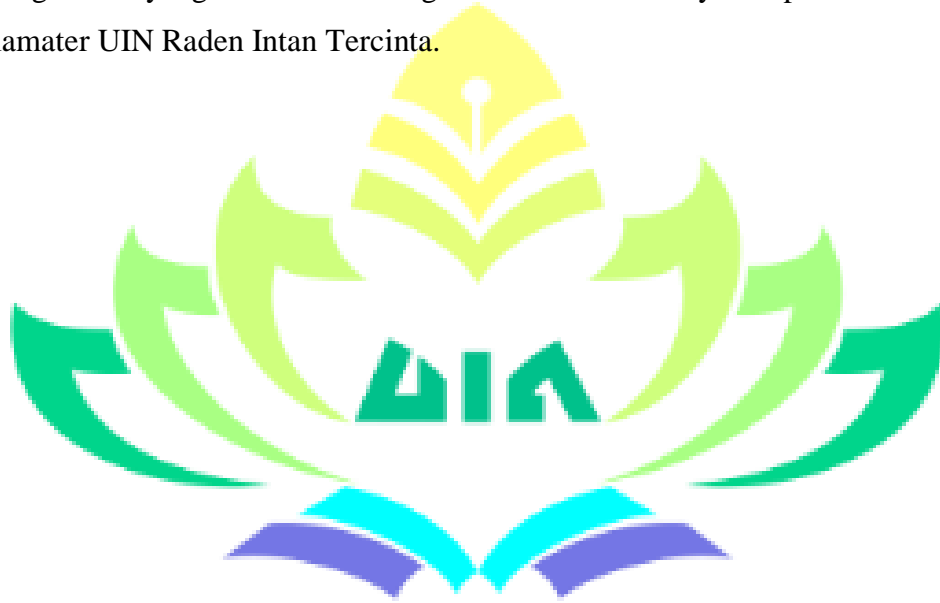


¹ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal, 2010) h. 558

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan kepada orang-orang yang mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya:

1. Kepada orang tuaku Ayah Drs. Yusron dan Ibu Nurheni yang telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a, dukungan, serta jasa-jasa yang tidak akan pernah bisa dibalas demi keberhasilan dan terwujudnya cita-citaku.
2. Abangku Amri Yusnandar dan Istri Carmelita Puteri Reyadha yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil serta masukkan-masukkan guna meraih keberhasilan dan terwujudnya cita-cita adiknya.
3. Keluarga besar yang telah mendukung demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Almamater UIN Raden Intan Tercinta.

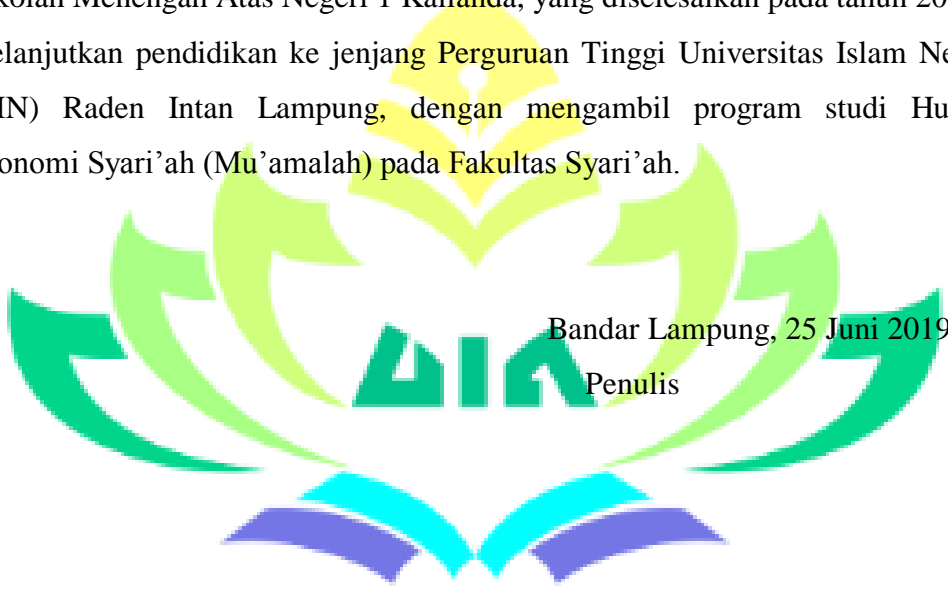


RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Marzha Dwi Syahroni, dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1997 di Merak Belantung. Anak kedua dari pasangan Bapak Yusron dan Ibu Nurheni.

Adapun pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, yang diselesaikan pada tahun 2009
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalianda, yang diselesaikan pada tahun 2012
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalianda, yang diselesaikan pada tahun 2015
4. Melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) pada Fakultas Syari'ah.



Bandar Lampung, 25 Juni 2019

Penulis

Marzha Dwi Syahroni

NPM. 1521030482

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN DI ATAS BAGAN (Studi kasus di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna menyelesaikan program sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan yang terjadi pada mahasiswa;
3. Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H dan Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku ketua dan sekretaris jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. dan Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai pembimbing akademik yang selalu memberikan masukan, saran dan bimbingannya sehingga dapat terealisasikannya skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung;

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Masyarakat Desa Merak Belantung yang telah mendukung dan berkoordinasi dengan baik untuk diperkenankan keikutsertaannya dalam observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi guna terselesaikan skripsi ini dengan baik
8. Sahabat-sahabatku Esa Tamara Putri, Muhammad Alhadad, Sherli Andini, Zakaria Achmad, Nata Winanda, Richan Dwi Putra, Anwar Setiadi, Nico Efendi, yang telah mendukung baik dalam keadaan suka maupun duka, yang memberikan semangat positif untuk menyelesaikan skripsi ini,
9. Teman-teman Muamalah B 2015 yang telah berproses bersama-sama dengan suka maupun duka, dan cerita-cerita menarik lainnya. pengalaman yang sangat berharga bisa bergabung dengan kalian. Dan merupakan pelajaran berharga bisa bertumbuh secara bersama-sama.
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah Angkatan 2015.
11. Teman-teman Panzer FC, UKM ORI Bidang Sepak Bola.
12. Almamater uin.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitianpenelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 25 Juni 2019

Penulis,

Marzha Dwi Syahroni

NPM. 1521030482

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENEGASAN JUDUL | 1 |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul..... | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah | 3 |
| D. Rumusan Masalah..... | 6 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| F. Metode Penelitian | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 12 |
| A. Pengertian Jual Beli..... | 12 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli..... | 15 |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli. | 17 |
| D. Macam-Macam Jual Beli..... | 35 |
| E. Jual beli yang Dilarang..... | 36 |
| F. Pembatalan dan Berakhirnya Jual Beli | 50 |
| G. Hikmah dan Manfaat Jual Beli. | 58 |
| BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN..... | 59 |
| A. Gambaran Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan..... | 59 |
| 1. Sejarah Berdirinya Desa Merak Belantung | 59 |
| 2. Kondisi Geografis Desa Merak Belantung | 61 |
| 3. Kondisi Demografis Desa Merak Belantung..... | 62 |
| 4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Merak Belantung..... | 62 |

| | | |
|----|--|----|
| 5. | Visi dan Misi Desa Merak Belantung..... | 65 |
| 6. | Program Kerja Desa Merak Belantung..... | 66 |
| 7. | Struktur Organisasi Desa Merak Belantung. | 68 |
| B. | Praktik Jual Beli Ikan di Atas Bagan Apung di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan . | |
| 1. | Awal mula terjadinya praktik jual beli ikan yang dilakukan diatas bagan apung..... | 68 |
| 2. | Pendapat Para Pengelola Bagan dan Pemilik Bagan Tentang Praktik Jual Beli Ikan di Atas Bagan Apung..... | 71 |

BAB IV ANALISIS DATA.....

| | | |
|----|---|----|
| A. | Praktik Jual Beli Ikan di Atas Bagan Apung di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan | 78 |
| B. | Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan yang Dilakukan di Atas Bagan Apung di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan | 79 |

BAB V PENUTUP.....

| | | |
|----|-----------------|----|
| A. | Kesimpulan..... | 84 |
| B. | Saran | 85 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul-judul dari proposal ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan di Atas Bagan". Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari, dan sebagainya.)²
2. Hukum Islam adalah sebuah kumpulan aturan baik berupa perundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah Negara atau masyarakat terikat sebagai subjeknya. Hukum Islam sendiri merupakan sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.³
3. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁴

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 1470.

³ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 90.

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung, Permatanet Publishing, 2016) h. 104.

4. Ikan adalah binatang bertulang belakang yang hidup di dalam air, berdarah dingin, umumnya bernafas dengan insang, tubuhnya biasanya bersisi, bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan sirip.⁵
5. Bagan adalah sebutan masyarakat Desa Merak Belantung untuk sejenis alat tangkap ikan terbuat dari bambu yang disusun sedemikian rupa agar bisa mengapung ditengah laut. dibentuk dengan rangkaian bambu berbentuk segi empat, pada bagian tengah bagan dipasang jaring/waring. pada dasarnya alat ini terdiri dari bambu, jaring yang berbentuk segi empat yang dikatkan pada bingkai yang terbuat dari bambu, pada keempat sisinya terdapat bambu bambu yang menyilang rumah sederhana berfungsi sebagi pelindung, menaruh lampu, dan melihat ikan.⁶

Berdasarkan penjelasan dari beberapa istilah-istilah di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai praktik menjual dan membeli ikan yang dilakukan di atas bagan apung yang terdapat di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ini sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

⁵ Departemen Pendidikan Indonesia, *Op.Cit*, h. 519.

⁶ <http://dutalaut.blogspot.com/2016/03/bagan-apung.html> Diakses pada 7 Oktober 2018, Pukul 19:12 WIB.

Karena adanya suatu praktik jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan apung dan proses transaksi di Desa Merak Belantung tersebut terjadi ketika pembeli mendatangi pihak penjual ke bagan apung tersebut dan membuat masyarakat resah karena kekurangan akan habisnya ikan yang di jual di Tempat Pelelangan Ikan.

2. Alasan Subjektif

- a. Alasan subjektif dalam penelitian ini didukung literatur yang sangat memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
- b. Judul yang diangkat erat kaitannya dengan Fakultas Syariah terutama dalam jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni saat ini.
- c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat di angkatnya judul ini sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan Pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Islam sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan sempurna memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan batin dengan memayunginya dibawah prinsip

⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012) h. 3.

keseimbangan.⁸ Segala aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam baik secara ibadah dan muamalah, termasuk di dalamnya terdapat jual beli.

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*antaradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya pergantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.⁹ atau dapat diartikan dengan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak.¹⁰ Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹¹

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29)

Jual beli yang terjadi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sama halnya dengan jual beli di daerah-daerah lain, adanya penjual dan pembeli yang berdasarkan kerelaan dalam tukar-menukar barangnya. Di Desa Merak Belantung, sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari ikan. Beragam cara nelayan untuk menangkap ikan, ada yang menggunakan pancing, jerat ataupun jaring.

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) h. 14.

⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015) h. 167.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016) h. 68.

¹¹ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal, 2010) h.83.

Inovasi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan salah satunya membuat bagan apung yang diharapkan bisa mendapatkan hasil laut dengan cara menjaring dan mendapatkan hasil yang lebih banyak.

Bagan-bagan apung kian menjamur dilaut Desa Merak Belantung. hasil laut yang berlimpah membuat masyarakat berinovasi membuat olahan yang bisa dijual guna memenuhi kebutuhan hidup. Banyaknya permintaan berupa hasil laut maka terjadilah transaksi jual beli yang dilakukan nelayan dan masyarakat. Akan tetapi terdapat praktik jual beli yang dilakukan di atas Bagan Apung.

Jual beli tersebut dilakukan dengan cara mendatangi pihak penjual atau nelayan yang sedang mengambil ikan dari bagan apungnya. Penjual dan pembeli yang bertransaksi di atas bagan apung tersebut didatangi oleh pembeli ikan dari luar daerah Merak Belantung dengan menggunakan perahu atau kapal laut. Transaksi di atas bagan apung dilakukan sebelum nelayan atau pihak penjual sampai di tempat pelelangan ikan (TPI) yang ada di Desa Merak Belantung.

Adanya jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan tersebut, sangat meresahkan terutama pemilik bagan tersebut yang terkadang tidak mengetahui adanya transaksi jual beli yang dilakukan di tengah laut, dikarenakan pihak pengelola bagan apung tersebut tidak mengatakan bahwa telah terjadi transaksi jual beli ikan terlebih dahulu di atas bagan apung. Tidak hanya pemilik bagan saja yang mengalami kerugian tetapi masyarakat juga mengalami kerugian karena tidak adanya atau minimnya hasil tangkapan nelayan.

Nelayan yang seharusnya menjual hasil lautnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tetapi dilakukan di atas bagan apung. Dibangunnya tempat pelelangan ikan di

Desa Merak Belantung itu guna untuk memperjualbelikan hasil yang diperoleh nelayan yang mencari ikan dengan cara menjaring, memancing atau menjerat. Lalu hasil laut berupa ikan, cumi-cumi, udang, dan lain-lain, dijual di tempat pelelangan ikan tersebut guna terbentuknya proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli ikan. Karena terjadinya jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan tersebut membuat masyarakat merugi karena sedikitnya ikan yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan tersebut, jadi mata pencaharian masyarakat yang memanfaatkan hasil laut tersebut produksinya terhambat karena tidak adanya bahan pokok untuk diolah menjadi makanan atau untuk dijual.

Berdasarkan argumen, menurut penulis penelitian ini menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dimana proses dalam jual beli yang dilakukan ini akan mendampakkan kecemburuan sosial karena berbedanya harga ketika terjadinya transaksi di atas bagan apung dan di tempat pelelangan ikan (TPI). Tertariknya penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut itu karena untuk mengetahui hukum menjual dan membeli ikan yang dilakukan di atas bagan apung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli ikan di atas bagan apung yang terjadi di Desa Merak Belantung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan apung di Desa Merak Belantung?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan di atas bagan apung yang terjadi di Desa Merak Belantung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan di Desa Merak Belantung.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperkaya keilmuan Islam khususnya berkaitan dengan perbuatan ibadah dan muamalah dalam kehidupan masyarakat.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum Islam bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sistematis dan teliti, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan susunan dan tafsiran yang baru

dari pengetahuan yang sudah ada.¹² Metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensial, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian.

Berkenaan dengan masalah metode penelitian ini menjelaskan beberapa hal:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Desa Merak Belantung, kec. Kalianda, Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pencanderaan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹³ Maka, di dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan apung Desa Merak Belantung, kec. Kalianda, kab. Lampung Selatan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau diperoleh dari sumber pertama, adapun sumber data yang diperoleh dari data-data lapangan, yaitu dengan melakukan pencatatan sumber data melalui wawancara atau

¹² Moechar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 5.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 75.

pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang hasilnya diperoleh dari masyarakat serta tokoh masyarakat desa setempat.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya di dapat dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁵ Gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 56 orang yang berprofesi sebagai nelayan yang terdata di Desa Merak Belantung. Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik dan pengelola bagan apung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.¹⁶ Arikunto menyatakan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah

¹⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001) h.113.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi IV* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998) h. 115.

¹⁶ *Ibid*, h. 117.

kurang dari 100 orang maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.¹⁷ Jadi, sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel bertujuan atau *purposive sample* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁸ Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 8 orang diantaranya 2 orang pemilik bagan dan 6 orang pengelola bagan apung.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan.¹⁹ Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada penjual dan pembeli ikan di atas bagan apung di Desa Merak Belantung.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²¹

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) h. 102.

¹⁸ *Ibid.* h. 183.

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h.111.

²⁰ *Ibid.* h.118.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 274.

5. Pengolahan Data

- a. *Editing* data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.²²
- b. *Sistematis* adalah melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan beraturan sesuai dengan klarifikasi yang diperoleh.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain, pandangan hukum Islam mengenai jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan apung, yang akan dikaji menggunakan metode *deskriptif kualitatif* berdasarkan teori jual beli. Menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum. Kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.

²² Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h.75.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli) dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus jual berarti beli. Jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar/*barter*).

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:²³

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ

“tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.

Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمَلُّكًا

“Tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan”

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam artian umum yaitu:

²³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017) h. 63.

هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ دَانًا أَوْ نَقْدًا

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁴ Dan menurut pasal 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'I* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.²⁵ Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Dapat diketahui bahwa rukun jual beli adalah menyangkut *ba'I* (penjual), *mustari* (pembeli), *sighat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud'alaih* (benda atau barang).²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan barang,²⁷ atau tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁸ Jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif karena uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan system barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al muqayyadah*.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 101

²⁵ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 142.

²⁶ *Ibid.* h.143.

²⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) h. 167.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 67.

Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.²⁹

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan secara suka sama suka atau secara sukarela antara kedua belah pihak dengan tujuan memiliki barang tersebut. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Adakalanya kebutuhan yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan.

Untuk itu diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia, salah satunya dengan jalan melakukan jual beli. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dan masing-masing pihak atau salah satu

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h. 21.

pihak, maka jual beli tersebut tidak sah.³⁰ Jual beli yang berlangsung jujur dan adil amatlah ditekankan dalam perdagangan atau *ba'i*.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

1. Al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah, 2: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ٢٧٥³¹

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 2:275)

Pada QS. Al-Baqarah, 2:198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُواهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَوْمٍ لَّا يَعْلَمُونَ ١٩٨³²

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat" (QS. Al-Baqarah, 2:198).

Pada QS An-Nisa' [4: 29] dijelaskan:

³⁰ Ibid., h. 22.

³¹ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabil, 2010) h.47.

³² Ibid. h. 31.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ³³ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa, 4:29)

2. Hadis

Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ) ³⁴

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawabannya Nabi, “Kerja dengan Tangan dan semua jual beli yang mabrur”

Berdasarkan nash di atas kaum muslimin telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Manusia senantiasa membutuhkan barang yang ada pada orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu tanpa adanya ganti/imbalannya. Oleh karena itu jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan dalam kehidupan manusia.³⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَ كَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا

³³ Ibid. h. 83.

³⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz. 28, No. 17265, (Beirut: Al- Risalah, 2001), h. 502.

³⁵ Rozalinda, *Op.Cit.* h. 65.

الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁶

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya memberi pilihan kepada pihak lain’. Beliau bersabda, ‘Jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu maka jual beli menjadi wajib’.” (HR. Bukhari-Muslim)

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh Syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dengan jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/tara’dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:³⁷

1. Pihak-pihak. Yaitu pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa

³⁶ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*, Juz. III, No. 2112 (Damaskus: Dar Thauq al- Najah, 1422 H), h. 64.

³⁷ Mardani, *Op.Cit.* h. 102.

satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas takaran atau timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain telah terjual.

3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:³⁸

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* penjual dan pembeli
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad. berikut tujuh syarat jual beli, yaitu:³⁹

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syaratnya mutlak keabsahannya, berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*"
2. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. *An-nisaa'*(4): 5 dan 6.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 115.

³⁹ Mardani, *Op.Cit.* h. 104.

3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa se-izin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“jangan lah engkau jual barang yang bukan milikmu.”*
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang yang haram seperti khamr. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya Allah mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*.
5. Objek transaksi adalah barang yang dapat diserahterimakan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang atau burung dilangit karena tidak bias diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Muslim: *“dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jualmbeli gharar (penipuan).”*
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah jual beli barang yang tidak jelas.
7. Harga harus jelas saat transaksi.

Syarat- syarat bagi sahnya suatu *bai'*, yaitu (Ayub, 2007: 214-215; 133-153)⁴⁰:

1. Syarat Kecakapan Para Pihak

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2015) h. 186-190.

- a) Orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Menurut Al-Ghazali ada 4 (empat) golongan yang tidak sepatutnya melakukan muamalah, yaitu anak kecil, orang gila hamba, dan orang buta.
- b) Syarat yang terkait dengan orang atau pihak yang membuat akad adalah bahwa orang itu harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.⁴¹

2. Kesepakatan Para Pihak

Bai' hanya terjadi secara sah bila dilakukan berdasarkan kebebasan dan kesepakatan (*free and mutual consent*) antara penjual dan pembeli.⁴²

3. Penawaran dan Penerimaan

Terjadinya transaksi *bai'* dimulai dengan adanya penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. Bila pihak yang menerima penawaran menyatakan penerimaannya (*acceptance*) atas penawaran tersebut, maka terjadilah transaksi *bai'* yang dimaksud.⁴³

4. Isi Penawaran dan Penerimaan

Penawaran dan Penerimaan harus memuat kepastian mengenai harga, kepastian mengenai tanggal dan tempat penyerahan barang, dan kepastian tentang waktu pembayaran.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.* h. 187.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

5. Kepemilikan Barang

a) Penjual barang harus merupakan pemilik (*mabi'*) atau merupakan kuasa dari pemilik barang. Dengan kata lain, barang yang bukan milik penjual tidak dapat dijual. Misalnya, A menjual kepada B sebuah mobil yang masih akan dibeli oleh A dari C. Mobil tersebut tidak dapat dijual oleh A karena mobil tersebut masih milik C. Oleh karena itu mobil tersebut tidak dimiliki oleh A ketika jual beli terjadi, maka jual beli tersebut batal demi hukum (*void*).

b) Sebelum bank menjual barang tersebut kepada nasabah, bank harus telah menjadi pemilik barang tersebut (yaitu barang yang dibeli bank dari pemasok) dan bank telah menerima kepemilikan barang tersebut secara yuridis. Menurut Rasulullah SAW, adalah dilarang untuk menjual barang sampai barang tersebut menjadi milik penjual (HR. Abu Daud). Rasulullah SAW melarang menjual gandum sampai gandum tersebut menjadi miliknya (HR. Muslim).⁴⁵

6. Spesifikasi Barang

a) Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan spesifikasinya.

b) Antara penjual dan pembeli harus menyepakati spesifikasi dari barang yang diperjual belikan itu. Spesifikasi tersebut harus diuraikan secara terperinci sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan ketika barang tersebut diserahkan kepada pembeli oleh penjualnya.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

7. Identifikasi Barang

Barang yang diperjualbelikan harus secara spesifik diketahui dan teridentifikasi oleh pembeli, misalnya A mengemukakan kepada B: “saya menjual 100 karung kapas yang berada di dalam gedung tersebut.” Apabila A tidak mengidentifikasi karung kapas tersebut, maka jual beli tersebut batal karena apabila barang tersebut hilang maka bukan saja sulit untuk dapat memastikan siapa pihak yang harus memikul resiko kehilangan tersebut tetapi juga sulit untuk menentukan berapa besar nilai kehilangan tersebut.⁴⁷

8. Eksistensi Barang

Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada (sudah eksis) ketika jual beli terjadi. Seseorang tidak dapat menjual anak sapi yang belum lahir. Anak sapi tersebut bukan saja belum dapat diketahui spesifikasinya, tetapi juga belum tentu lahir dengan keadaan hidup. Saya berpendapat bahwa barang tersebut tidak perlu harus setelah ada pada saat akad *bai'* dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, tetapi pada saat ketika jual beli terjadi, yaitu pada saat kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli, barang tersebut harus telah ada dan hak kepemilikan atas barang tersebut telah ada di tangan penjual.⁴⁸

9. Pemindahtanganan

a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipindahtangankan hak kepemilikannya. Hal ini terkait dengan peralihan hak kepemilikan

⁴⁷ *Ibid.* h.188.

⁴⁸ *Ibid.*

tersebut dari penjual kepada pembeli ketika transaksi *bai'* terjadi dan selesai dilakukan.

- b) Hak kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan tersebut harus secara yuridis beralih kepada pembeli dengan konsekuensi bahwa dengan beralihnya hak kepemilikan ini maka beralih pula segala resiko yang dapat timbul terhadap barang itu, misalnya resiko kerusakan, kecurian, ketinggalan zaman dan turunnya harga.⁴⁹

10. Penguasaan Barang oleh Penjual

Barang yang diperjualbelikan harus secara fisik atau secara konstruktif berada pada kekuasaan (*physical or constructive possession*) penjual ketika jual beli terjadi. Penguasaan konstruktif berarti bahwa sekalipun pembeli belum menerima penyerahan barang tersebut secara fisik ke dalam pengendaliannya, namun semua hak dan kewajiban atas barang itu telah beralih kepadanya.⁵⁰

11. Kehalalan Barang

Barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal (tidak diharamkan menurut syariah) dan harus memiliki nilai ekonomis. Suatu barang yang tidak memiliki nilai ekonomis untuk diperdagangkan tidak dapat dijual; selain itu barang yang diperjualbelikan harus bukan merupakan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* h. 189.

barang yang diharamkan seperti daging babi, minuman keras dan lain sebagainya.⁵¹

12. Penyerahan Barang

Penyerahan (*delivery*) barang yang dijual kepada pembeli harus pasti waktunya dan tidak boleh bergantung kepada suatu kejadian yang tidak pasti. Misalnya si A menjual mobilnya yang telah hilang dengan harapan A akan mendapatkan kembali barang tersebut. Jual beli yang demikian itu batal (*void*).⁵²

13. Harga Barang

Harga barang harus ditentukan diawal dan harga tersebut berlaku terus tanpa dapat diubah. Misalnya, A berkata kepada B, “apabila anda membayar barang ini dalam waktu sebulan, maka harga barang ini adalah Rp50.000. namun apabila anda membayar dalam waktu dua bulan, maka harga barang ini adalah Rp.55.000,”. Oleh karena harga barang tersebut tidak pasti, maka jual beli tersebut batal (*void*). A tidak dilarang untuk memberikan dua pilihan tersebut kepada B, namun agar jual beli tersebut sah, B harus menentukan salah satu pilihan tersebut.⁵³

14. Jual Beli Bersyarat

a) Jual beli tidak boleh bersyarat (harus *unconditional*). Suatu jual beli yang bersyarat (*conditional sale*) mengakibatkan tersebut tidak sah (*invalid*),

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

kecuali apabila syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari suatu bentuk perdagangan yang lazim dan tidak dilarang oleh syariah.

b) Jual beli harus terjadi seketika dan mutlak (*instant and absolute*). Suatu jual beli yang dikaitkan dengan suatu tanggal dikemudian hari atau suatu jual beli yang diganungkan pada suatu waktu atau pada suatu kejadian yang masih akan terjadi dikemudian hari adalah batal demi hukum (*void*). Misalnya A pada tanggal 1 januari menyatakan kepada B, “saya akan menjual mobil saya kepada anda pada tanggal 1 februari.” A dapat memberi suatu janji, namun jual beli itu sendiri baru akan terjadi pada tanggal 1 februari dan baru pada tanggal tersebut semua hak kewajiban atas barang itu beralih kepada B, atau perjanjian akan dilakukan apabila “saya pindah rumah”. Jual beli tersebut batal karena digantungkan pada waktu atau pada kejadian yang masih akan terjadi dikemudian hari bahkan kejadian tersebut belum tentu terjadi.⁵⁴

Terdapat empat macam syarat dalam jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat “*luzum*”. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli “*gharar*” (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.⁵⁵

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah maka akad tersebut

⁵⁴ *Ibid.* h. 190.

⁵⁵ Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Op.Cit.* h. 143.

“*fasid*”. Jika tidak memenuhi syarat “*nafadz*”, maka akad tersebut “*mauquf*” yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat “*lijum*” maka akad tersebut “*mukhayyir*” (pilih-pilih), baik “*khiyar*” untuk menetapkan maupun membatalkan.⁵⁶

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan syarat jual beli, seperti diuraikan sebagai berikut:⁵⁷

1. Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli antara lain berkaitan dengan:

a. Syarat Terjadinya Akad

Merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jual beli dianggap batal. Tentang ini ulama Hanafiyah menetapkan beberapa syarat:

1) Syarat *Aqid* (orang yang berakad).

Aqid harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Berakal dan “*Mumayyiz*”. Ulama Hanafiyah tidak mengisyaratkan harus baligh. “*tasharuf*” yang boleh dilakukan anak “*mumayyiz*” dan berakal secara umum terbagi atas tiga bagian, yaitu *tasharruf* yang bermanfaat secara murni seperti hibah; *tasharuf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil; dan *tasharuf* yang berada

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

diantara kemanfaatan dan kemudhorotan, yaitu aktifitas yang boleh dilakukan, akan tetapi atas seizing wali.

2) Aqid Harus Berbilang

Sehingga tidaklah sah akad yang dilakukan seorang diri minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

b. Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *ijab* dan *qabul* namun demikian dalam *ijab* dan *qabul* terdapat tiga syarat, yaitu:

1) Ahli Akad.

Ulama Hanafiyah memandang bahwa seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum *baligh*) dapat menjadi akad. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* tergantung terhadap izin walinya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akal nya adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

2) Qabul harus sesuai dengan ijab.

3) Ijab dan qabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

c. Tempat Akad

Harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*.

d. Objek Akad (*ma'qud'alaih*).

Ma'qud'alaih harus memenuhi empat syarat yang penting, yaitu:

- 1) *Ma'qud'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak.
- 2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- 3) Benda tersebut harus merupakan milik sendiri.
- 4) Dapat diserahkan.

e. Syarat Pelaksanaan Akad

Pelaksanaan akad mengharuskan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu benda yang dimiliki *aqid* atau yang berkuasa untuk akad dan pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, oleh karena barang tersebut bukanlah miliknya sendiri kecuali apabila diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual yang ditangguhkan.

Berdasarkan '*nafadz*' dan '*waqaf*' (penangguhan) jual beli terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Jual Beli *Nafidz* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.
- 2) Jual Beli *Mauquf* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan '*nafadz*' yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melaksanakan akad, seperti jual beli '*fudhul*' (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian jika pemiliknya

mengizinkan jual beli '*fudhul*' dipandang sah sebaiknya, jika pemiliknya tidak mengizinkan dipandang batal (Ibn Rusyd, hal 171).

f. Syarat Sah Akad

- 1) Syarat Umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhidar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan (*gharar*), kemudhorotan, dan persyaratan-persyaratan yang dapat merusak lainnya.
- 2) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi syarat:
 - a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang yaitu pada jual beli benda harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan hilang dan rusak.
 - b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
 - c) Serah terima benda dilaksanakan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.
 - d) Terpenuhi syarat penerimaan.
 - e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
 - f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya, oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang masih ada ditangan penjual.

- 3) Syarat lujum (kemestian). Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari “*khiyar*” (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang berakad), *sighat*, *ma'qud'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat (Ibn Rusyd, hal 125).

- a. Syarat *aqid* merupakan penjual dan pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat ditambah satu bagi penjual.

- 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
- 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau wakilnya.
- 3) Keduanya dalam keadaan sukarela, oleh karena jual beli berdasarkan paksaan tidaklah sah.
- 4) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus islam bagi *aqid* kecuali memberi hamba yang muslim dan membeli mushaf.

- b. Syarat dalam *sighat*.

Tempat akad harus bersatu dan pengucapan ijab qabul tidak dipisah. Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu akid secara adat.

- c. Syarat yang diharamkan

Bukan barang yang dilarang *syara*, harus suci, tidak diperbolehkan menjual khamr, bermanfaat menurut pandangan *syara*; diketahui oleh kedua orang yang berakad; dan dapat diserahkan.

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *sighat* dan *ma'qud'alaih*. Persyaratan tersebut adalah:

a. Syarat *Aqid*.

1) Dewasa atau Sadar

Aqid atau *baligh* dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.

2) Tidak Dipaksa atau Tanpa Hak

Jual beli yang dilakukan tanpa paksaan dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hak.

3) Islam.

Dipandang tidak sah, seorang kafir yang membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fiqh, dan juga dapat membeli hambanya yang muslim.

b. Syarat *Sighat*.

- 1) Berhadap-hadapan. Penjual atau pembeli harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang yang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju dengan demikian, tidak sah berkata, “saya menjual kepadamu ahmad”, padahal nama pembeli bukan ahmad.

- 2) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan “saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.
- 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
- 4) Orang yang mengucap qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucap ijab, kecuali jika diwakilkan.
- 5) Harus menyebut barang dan harga.
- 6) Ketika mengucapkan sighat disertai niat (maksud).
- 7) Pengucapan ijab dan qabul, jika tidak ada jual beli yang dilakukannya batal.
- 8) Ijab qabul tidak terpisah. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
- 9) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- 10) Tidak berubah lafadz. Lafadz ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, “saya jual lima ribu, kemudian berkata lagi, saya menjualnya dengan sepuluh ribu” padahal barang yang dijual masih sama dengan barang pertama dan belum ada qabul.
- 11) Berkesesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
- 12) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akad.
- 13) Tidak dikaitkan dengan waktu.

c. *Syarat Ma'qud'alaih* (barang)

- 1) Suci.

- 2) Bermanfaat.
- 3) Dapat diserahkan.
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

4. Ulama Hambaliyah

Menurut ulama Hambaliyah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat baik dalam *aqid*, *sighat* dan *ma'qud'alaih*.

a. Syarat *aqid*.

- 1) Dewasa, *aqid* harus dewasa (*baligh* dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah meminta izin dari walinya yang mengandung unsur kemaslahatan.
- 2) Adanya keridhaan. Masing-masing *aqid* harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikhendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa. Ulama Hambaliyah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan mendesak dengan harga diluar harga lazim.

b. Syarat *sighat*.

- 1) Berada ditempat yang sama.
- 2) Tidak terpisah antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.
- 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c. Syarat *ma'qud'alaih*.

- 1) Harus berupa harta. *Ma'qud'alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa. Ulama Hambaliyah mengharamkan jual beli Al-Qur'an baik orang muslim ataupun orang kafir sebab Al-Qur'an wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitupula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak ada manfaatnya.
- 2) Milik penjual secara sempurna. Dipandang tidak sah jual beli *fudhul* yakni menjual barang tanpa seiring pemiliknya.
- 3) Barang dapat diserahkan ketika akad.
- 4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli *Ma'qud'alaih* harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.
- 5) Harga diketahui oleh kedua pihak akad.
- 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga, dan *aqid* harus terhidar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

D. Macam-Macam Jual Beli

Ada empat macam jual beli, yaitu:

1. *Muqa'izah*: yakni jual beli barang dengan barang.
2. *Sharf*: yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak.

3. *Salam*: yakni jual beli dengan penyerahan barang dibelakang, seperti pembelian gandum yang masih diladangnya.

4. *Mutlaq*: yakni jual beli bebas barang dengan uang.

Kewenangan untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan disebut opsi(*khiyar*). Itu terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam *ijab* maupun *qabul*. Seorang pembeli memiliki hak *khiyar* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya, jika dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak *khiyar* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak *khiyar* untuk memeriksa itu berlangsung terus sampau kapan pun sesudah terjadinya kontrak, kecuali kalau rusak oleh keadaan. Hak *khiyar* secara hukum boleh diminta oleh pihak yang mana pun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut.

Kepemilikan hak *khiyar* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakan tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menemukan cacat barang apa pun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli itu.⁵⁸

E. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam syariah cukup banyak. Menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *sahih* dan *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga yaitau *sahih*, *fasid*, dan batal.

⁵⁸ Muhammad Syarif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016) h. 125.

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, disini akan diuraikan beberapa cara sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: (1). Menyakiti hati sipenjual, pembeli atau pihak lain, (2). Menyempitkan gerakan pasar. (3). Merusak ketentraman umum.⁵⁹

1. Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya).

yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjual belikan buah-buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya. Atau jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini termasuk jual beli yang bathil berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶⁰
“Dari Abdullah ibn Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.”

2. Jual beli *thalagi al-ruqban* dan jual beli *hadhir libad*.

yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.⁶¹ Jual beli ini terlarang berdasarkan hadis:⁶²

Sabda Rasulullah SAW:

⁵⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008) h. 284

⁶⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ju'fi, *Op. Cit.*, h. 70.

⁶¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015) h. 73.

⁶² Isnaini Harahap, Yenni Samri Julianti Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 170.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ. وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ... (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)⁶³

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. berkata “janganlah kamu menghadang pedagang dari desa, jangan sebagian kamu terhadap yang lainnya melakukan an-najasy (jual beli dengan tujuan merusak dagangan orang lain, menawarkan barang untuk menjerumuskan orang lain), dan janganlah orang kota menjualkan dagangan orang desa””. (HR. Bukhari)

3. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.

Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara, dan ikan di lautan. Bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang bathil.

Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَارٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ).⁶⁴

“Dari ibn Mas’ud sesungguhnya Rasulullah SAW. berkata “janganlah kamu menjual ikan yang masih dalam air karena jual beli itu termasuk gharar”.

Terhadap persoalan ini golongan Hanafiyah merumuskan kaidah:

يُلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ

“Barang siapa yang diperjualbelikan harus dapat diserahterimakan”

4. Jual beli gharar.

Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko.

⁶³ Sulaiman bin Ahmad bin Ayub al-Thabrani, Musnad al-Syamiyyin, Juz. IV, N0. 3344 (Beirut: Al-Risalah, 2010), h. 294.

⁶⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Op.Cit*, Juz. VI, No. 3676, h. 197.

Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan, adalah dilarang.⁶⁵ akad muamalah dilarang memperjanjikan hal yang keberadaanya tidak pasti. Artinya, akad muamalah dilarang memperjanjikan sesuatu yang bersifat *gharar* dengan ancaman kebatalan demi hukum atas akad tersebut. *Gharar* merupakan larangan utama yang kedua dalam transaksi muamalah setelah *riba*.

Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.10/16PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah memberikan pengertian mengenai *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam bank syariah.

Gharar mengacu kepada ketidakpastian (*uncertainty*) atau *hazard* yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan di dalam akad. Setiap jual beli atau akad/perjanjian yang mengandung unsur *gharar* adalah dilarang⁶⁶ Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk. Di atas onggokan terlihat baik, namun dalam onggokan tersebut terdapat buah yang rusak.

⁶⁵ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-Adalah, Vol.XII No.3, 2015, h. 656. (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390> diakses 27 Juni 2019, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* h. 169

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ
الْغَرَرِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).⁶⁷

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan lemparan dan jual beli yang mengandung tipuan”.

Jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidaktahuan (*jalalah*) antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan (Al Mu’jam al Wasith: 1960 dalam satrio (2005)). Imam Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* halaman 55 jilid keempat mendefinisikan *gharar* sebagai:⁶⁸

كُلُّ بَيْعٍ اِحتَوَى جَهَالَةً أَوْ تَضَمَّنَ مُخَاطَرَةً أَوْ قِمَارًا
“Setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidakpastian (*jahalah*), atau mengandung unsur risiko atau perjudian”

Ibn ‘Abidin mendefinisikan *gharar* sebagai “keraguan atas wujud fisik dari objek akad (*mabi’*)”. Madzhab Dhahiri, Ibn Hazm mengatakan: “unsur *gharar* dalam jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli, apa yang ia beli dan penjual, apa yang ia jual”. Imam Sarkhasi: “*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi”, dan ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha (Al Shidiq M. Al Amin al Dharir: 1993)⁶⁹.

5. Jual beli *an-Najasy*.

⁶⁷ Muslim bin Hajaj al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz. III, No. 1513 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, 2010), h. 1153.

⁶⁸ Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2015) h. 197.

⁶⁹ *Ibid*.

Yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli) tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang lain.

Modus ini terlarang berdasarkan Hadis Nabi SAW:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتُكْتَفَى مَا فِي إِنْثَاهَا.

“Sesungguhnya Abu Hurairah mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW berkaa “janganlah seseorang membeli atas pembelian saudaranya, janganlah orang kota menjual barang orang desa, janganlah kamu melakukan jual beli al-najasy, janganlah seseorang melebihkan atas pembelian saudaranya, janganlah seorang perempuan minta ditolak untuk memenuhi keinginan perutnya”.

6. Jual beli najis dan benda-benda najis.

Para ulama, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamr, babi, bangkai, darah, dan sperma karena semua itu menurut asalnya tidak dianggap mal (harta). Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ (لَا هُوَ حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ (قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوهَا تَمَنَّهُ). (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).⁷⁰

“Dari Jabir ibn Abdullah r.a. sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW berkata pada tahun penaklukan Makkah “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala.” Lalu Rasul ditanya orang: “ Ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai yang

⁷⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. II, No. 2167 (Beirut: Dar Ihya' al- Kutub al-Arabi, 2010), h. 732.

dijadikan sebagai pendompol perahu, penyemak kulit, alat penerangan bagi manusia?” Nabi menjawab: tidak, itu haram. Kemudian, Rasul melanjutkan: “Allah telah memerangi umat Yahudi, karena Allah telah mengharamkan bagi mereka lemak bangkai, mereka mengolah lemak itu, kemudian menjual dan memakan harganya.”

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, Wahbah Al-Juhali meringkasnya sebagai berikut:⁷¹

1. Terhalang sebab Ahlih (ahli akad)

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu *tasharruf* secara bebas dan baik. Tidak sah jual beli apabila dilakukan oleh:⁷²

a. Jual beli orang gila.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitupula sejenisnya, seperti orang mabuk.

b. Jual beli anak kecil.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan tau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada *ahlih*. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya, selama mereka melatih kedewasaan anak serta memberikan pengalaman.

c. Jual beli orang buta.

⁷¹ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Op.Cit.* h 151

⁷² *Ibid.* h.151-152

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa.

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya adanya *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e. Jual beli *fudhul*.

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai adanya izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidaksah.

f. Jual beli orang yang terhalang.

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah

mendekati mati hanya diperbolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*). Dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

2. Terlarang sebab *sighat*.

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama antara lain:⁷³

a. Jual beli *Mu'athah*.

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab di salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang yang dipandang sebagai *sighat* dengan perbuatan atau isyarat.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, yakni dengan *sighat lafazh*, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang *uzur*. Jual beli *al-mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama

⁷³ *Ibid.* h. 152-154.

Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi, menurutnya hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibnu Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan dalam hal-hal kecil.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan.

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan.

Disepakati keshahihan *akad* dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada di dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisan jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah sah sebab tidak memiliki syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

e. Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f. Jual beli *munjiz*.

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang sebab barang jualan (*Ma'qud'alaih*).

Secara umum, *ma'qud'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dengan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan *syara'*.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:⁷⁴

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di langit atau ikan yang ada di air, tidak berdasarkan ketetapan *syara'*.
- c. Jual beli *gharar*.

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam islam sebab Rasulullah SAW melarangnya. Menurut Ibn Al-

⁷⁴ *Ibid.* h. 154-157.

Maliki (Rachmat Syafei, 2001) *gharar* yang dilarang ada sepuluh macam, yaitu:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungannya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang.
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- 4) Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “saya jual kepadamu, jika Jaed datang”.
- 6) Menghargakan dua kali pada satu barang.
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- 8) Jual beli *husha'*, missal pembeli memegang tongkat, jika tongkat tersebut jatuh maka wajib membeli.
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang yang melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- 10) Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

d. Jual beli barang yang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tantang larangan jual beli yang najis, seperti *khamr*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena *najis* (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

e. Jual beli air.

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama empat Madzhab. Sebaiknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang *mubah*, yakni yang semua manusia boleh memanfatkannya.

f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan lima macam:

- 1) Harus jauh sekali tempatnya.
- 2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya.
- 3) Bukan pemiliknya harus ikut membagikan gambaran.
- 4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.
- 5) Penjual tidak boleh memberikan syarat.

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang.

Ulama Hanafiyah melarang jual beli yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaiknya, ulama

Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, maka akadnya *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu matang, akadnya diperbolehkan.

4. Terlarang sebab *syara* '.

Ulama sepakat membolehkan jual beli memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:⁷⁵

a. Jual beli riba.

Riba *nasiha* dan riba *fadh*l adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada *nash* yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, anjing dan patung

c. Jual beli dari hasil pengecatan barang.

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama

⁷⁵ *Ibid.* h. 157-159

Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu *makruh tahrim*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid*.

d. Jual beli waktu *adzan* jum'at.

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu *adzan* pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, *adzan* ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya *makruh tahrim*, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi *shahih haram*. Tidak jadi pendapat yang mahsyur dikalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah *zahirnya sahih*, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f. Jual beli orang tua tanpa anaknya yang masih kecil.

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

h. Jual beli memakai syarat.

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dahulu”. Begitupula menurut ulama Malikiyah memperbolehkannya jika bermanfaat. Menurut

ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak boleh jika hanya bermanfaat bagi salah satu akad.

F. Pembatalan dan Berakhirnya Jual Beli

Khiyar adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya. Oleh karena itu dalam jual beli dibolehkan memilih apakah akan diteruskan atau dibatalkan (dihentikan).⁷⁶ Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمضَاءِ الْعَقْدِ وَ عَدَمِ إِمضَائِهِ بِفَسْخِهِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ

“Hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam satu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu

⁷⁶ Khumedi Ja'far. *Op.Cit.* h.118

keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷⁷

Akad-akad lazim seperti akad *ba'I* dan *ijarah* bias di *fasakh* dengan hak *khiyar* yang dimiliki pihak akad, baik *khiyar* ini timbul karena *ijab qabul* atau timbul karena adanya syarat atau kesepakatan pihak akad. Bagi pihak akad yang memiliki hak *khiyar*, baik *khiyar syart*. *Khiyar aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bias memilih antar melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*. *Fasakh* tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam *khiyar aib* (*khiyar* yang disebabkan terdapat kerusakan pada objek kontrak) setelah objek diterima.

Menurut Hanafiyah, *fasakh* hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain atau putusan hakim. Disebabkan *'Adam al-tanfudz*, yakni kewajiban yang ditimbulkan oleh kontrak tidak dipenuhi oleh para pihak atau salah satu pihak bersangkutan. Jika hal itu terjadi, kontrak boleh *fasakh*. Misalnya dalam kontrak yang mengandung *khiyar naqd* (*khiyar* pembayaran).⁷⁸

Khiyar itu sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar asy-syarth*, dan *khiyar at-ta'yin*, dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari syara', seperti *khiyar al-'aib*, *khiyar ar-ru'yah* dan *khiyar al-majlis*. Berikut dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar* dimaksud.

1. *Khiyar al-Majlis*

⁷⁷ Nasrun Haroen. *Op.Cit.* h. 129

⁷⁸ Oni Sahroni, M Hasanuddin. *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016) h.187-188.

Yang dimaksud dengan *khiyar al-majlis* adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁷⁹

Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli barang yang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam an-Nawawi, muhadis dan pakar fiqh Syafi’i, menyatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung.⁸⁰

Akan tetapi tentang keabsahan *khiyar al-majlis* ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang berakad berhak mempunyai *khiyar al-majlis*, selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya *ijab* (ungkapan dari penjual) dan *qabul* (ungkapan dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum

⁷⁹ Nasrun Haroen. *Op.Cit.* h. 130.

⁸⁰ *Ibid.*

mengikat. Akan tetapi, apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyar*-nya dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat; kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu.⁸¹

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna dengan adanya *ijab* dari penjual, *qabul* dari pembeli. Alasan mereka adalah, suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya dan kerelaan itu ditunjukkan melalui *ijab* dan *qabul*.⁸²

2. *Khiyar at-Ta'yin*

Yang dimaksud dengan *khiyar at-ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya adalah dalam pembelian keramik, misalnya ada barang yang kualitasnya super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh, dengan alasan bahwa produk jenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli sehingga ia memerlukan bantuan pakar agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang dicari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar at-ta'yin* dibolehkan.⁸³

3. *Khiyar asy-Syarth*

⁸¹ *Ibid.* h. 131

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.* h.132

Yang dimaksud *khiyar asy-syarth* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi oranglain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar asy-syarth* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur-unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

Menurut jumhur ulama, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan oleh syara' untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan, maka akadnya dianggap batal.⁸⁴

4. *Khiyar al-'Aib*

Yang dimaksud dengan *khiyar al-'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.* h. 133.

⁸⁵ *Ibid.* h. 136

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilai menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.⁸⁶

5. *Khiyar ar-Ru'yah*

Yang dimaksud dengan *khiyar ar-ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ar-ru'yah* disyari'atkan dalam islam.⁸⁷

Selain dari kategori *khiyar* tersebut di atas, Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, membagi *khiyar* kepada empat macam, tambahannya adalah *khiyar al-ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan). *Khiyar al-ghabn* dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini:⁸⁸

1. *Tasriyah*

Tasriyah bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu terkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: “*Jangan ikat susu unta atau kambing.,Jika*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.* h. 137

⁸⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia group, 2015) h.

salah seorang diantara kamu membeli unta betina atau kambing yang susunya diikat, maka ia dapat hak (setelah memerah susunya) untuk tetap menjaganya, atau mengembalikannya bersama-sama dengan sejumlah kurma (jika susunya telah dikonsumsi oleh pembeli)”

Tindakan *tasriyah* membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan ini. Inilah pandangan mayoritas ulama. Ulama Hanafiyah tidak menyetujui pembatalan kontrak, mereka mengizinkan orang yang ditipu itu untuk menuntut tambahan yang tidak memberatkan dari penjual.⁸⁹

2. *Tanajush*

Tanajush bermakna menawarkan harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.⁹⁰

3. *Ghabn Fahisy*

Ghabn Fahisy adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan pihak lain. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak, bukan penyebab untuk membatalkan kontrak. Kontrak hanya dibatalkan jika disebabkan oleh penipuan atau penggambaran yang salah.⁹¹

4. *Thalaqqi al-Ruqban*

⁸⁹ *Ibid.* h. 107

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

Thalaqqi al-Ruqban merupakan transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ketempat penjualan (pasar). Orang-orang kota pergi keluar kota untuk menyongsong orang badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga yang murah, menghilangkan kesempatan buat si badui untuk terlebih dahulu mengetahui harga, agar ia tahu harga pasar. Ini merupakan bentuk lain dari penipuan yang penggambaran keliru dan memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak.⁹²

G. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

Hikmah dan Manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain: ⁹³

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara bathil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.

⁹² *Ibid.* h. 108.

⁹³ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h. 121.

6. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan

1. Sejarah Berdirinya Desa Merak Belantung

Desa Merak Belantung pada mulanya adalah hasil pemekaran dari beberapa desa yang ada di dalam wilayah Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Merak Belantung yang semula merupakan desa-desa kantong tempat warga bercocok tanam/berladang hasil dari masyarakat yang membuka lahan garapannya sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk, untuk pelayanan administrasi desa induk masing-masing kelompok yang sangat jauh dan sulit dijangkau untuk proses administrasi desa. Maka pada sekitar tahun 1970 pemuka-pemuka masyarakat dari masing-masing kelompok desa induk mengadakan pertemuan dan turun rumbuk untuk membuat desa sendiri-sendiri secara definitif.

Sebelum menjadi Desa Merak Belantung pada saat itu masyarakat sudah mempunyai nama masing-masing kelompok, blok, lingkungan, pekon yaitu dengan sebutan Pekon Merak, Pekon Muing, Pekon Lambur, Pekon Haringin, Pekon Kenjuru dan Pekon Batu Balai Panjang Pecoh yang nama-nama tersebut saat ini tetap dipertahankan sebagai nama dusun, yang terdiri dari 6 (enam) dusun tersebut. Adapun tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi pemakarsa/inspiratory berdirinya Desa Merak Belantung, dan sudah menjadi catatan sejarah bagi Desa Merak Belantung yaitu:

1. M. Adnan, sebagai yang mewakili pekon haringin sebagai warga desa Bumi Agung.
2. Syahbuddin, sebagai yang mewakili pekon merak sebagai warga desa bumi Agung.
3. H. A. Latif, sebagai yang mewakili pekon muing sebagai warga desa Kesugihan.
4. M. Yasin, sebagai yang mewakili pekon lambur sebagai warga desa Kesugihan.
5. M. Husin, sebagai yang mewakili pekon kenjuru sebagai warga desa Kunjir.
6. H. Ishaq, sebagai yang mewakili pekon Batu Balai Panjang Pecoh sebagai warga Desa Kunjir.
7. M. Amin US, sebagai yang mewakili pemuda dari desa Bumi Agung.
8. Abas Kasim, sebagai yang mewakili pemuda Desa Kesugihan.
9. Mukhni Ibrahim, sebagai yang mewakili pekon merak warga desa Kalianda.
10. A. Shobary, sebagai yang mewakili pekon lambur warga desa Bumi Agung.

Dalam pemekaran tersebut ada 4 (empat) desa induk sebagai penggerak/sponsor yaitu Desa Bumi Agung, Desa Kalianda, Desa Way Urang dan Desa Kesugihan, adapun desa-desa lainnya yaitu, Desa Maja, Desa Pauh, Desa Tanjung Iman, Desa Jondong Betung, Desa Canggung dan Desa Kota Guring sebagai Desa Pendukung.

Berkat kerja keras para prakarsa inspiratory serta dukungan dari masing-masing desa induk maka pada tanggal 20 maret 1972 maka resmi pekon-pekon masyarakat dari masing-masing desa tersebut bersatu dan menjadi desa definitif yang diberi nama desa Desa Merak Belantung, dengan kepala desa pertamanya Bapak Mukhni Ibrahim asal warga desa Kalianda dan sekretarisnya adalah Bapak Sobri asal warga desa Bumi Agung.

Sejak berdirinya Desa Merak belantung pada tahun 1972 hingga saat ini Desa Merak Belantung telah mengalami 7 (tujuh) kepemimpinan Kepala Desa adapun susunan Kepala Desa Merak Belantung secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Susunan Kepala Desa Merak Belantung Sejak Awal Berdirinya Hingga Saat Ini

| NO. | PERIODE | NAMA KEPALA DESA | KETERANGAN |
|-----|---------------|------------------|---------------------|
| 1. | 1972-1988 | MUKHNI IBRAHIM | KEPALA DESA PERTAMA |
| 2. | 1988-1995 | A. SHOBARY | KEPALA DESA KEDUA |
| 3. | 1995-1998 | ABDAN M. ADNAN | KEPALA DESA KETIGA |
| 4. | 1998-2006 | ABDAN M. ADNAN | KEPALA DESA KEEMPAT |
| 5. | 2007-2013 | ABDAN M. ADNAN | KEPALA DESA KELIMA |
| 6. | 2013-2017 | MUZANI H. UMAR | KEPALA DESA KEENAM |
| 7. | 2018-sekarang | M. YUMHARI AR | KEPALA DESA KETUJUH |

Sumber: Data Desa Merak Belantung 2019

2. Kondisi Geografis Desa Merak Belantung

Desa Merak Belantung secara Geografis terletak pada posisi 7,9676 ° Lintang Selatan dan 111,4312° Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran yaitu sekitar 128m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Selatan tahun 2012, selama tahun 2012 curah hujan di Desa Merak Belantung rata-rata mencapai 3.400mm. curah hujan hamper sepanjang tahun, sedikit musim kemarau, yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2012-2016.

Desa Merak Belantung merupakan salah satu desa dari 25 desa dan 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang memiliki luas 1.410 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Agom.
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Teluk Belantung.
- c. Bagian Barat berbatasan dengan PT. Perkebunan VII/Desa Bulok.
- d. Bagian Timur berbatasan dengan Muara Desa Lubuk.

Jarak tempuh Desa Merak Belantung ke Kecamatan Kalianda dan Kabupaten Lampung Selatan adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

3. Kondisi Demografis Desa Merak Belantung

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Merak Belantung tahun 2017, jumlah penduduk Desa Merak Belantung adalah terdiri dari 1.200 KK, dengan jumlah total 4.402 jiwa, dengan rincian 2.240 laki-laki, dan 2.162 perempuan. Jumlah penduduk Desa Merak Belantung per desember 2017 adalah 4.402 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 2.240 jiwa
- b. Perempuan : 2.162 jiwa
- c. Jumlah KK : 1.200 KK

4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Merak Belantung

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Merak Belantung Rp. 700.000,- secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Merak Belantung dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, nelayan, jasa/perdagangan. Industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang berkerja disektor

pertanian berjumlah 1.578 orang, yang berkerja disektor jasa berjumlah 512 orang, yang berkerja disektor industri 358 orang, yang berkerja disektor lain-lain 600 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.690 orang.

Pembagian lahan didesa merak belantung sebagian besar adalah lahan pertanian tanaman pangan padi di musim penghujan sedangkan jagung dan palawija di musim kemarau. Pada lahan tegalan banyak digunakan untuk tanaman kelapa dan buah-buahan yang cukup berlimpah dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan kopra dari kelapa tersebut atau dijual langsung buahnya.

Sebagian penduduk Desa Merak Belantung lainnya berprofesi sebagai nelayan yang memanfaatkan wilayah perairan yang ada di Desa Merak Belantung. Menurut data yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, banyak nelayan yang terdapat di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berikut data tersebut:

Tabel 2

Jumlah Nelayan Terdata di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

| No | URAIAN | BULAN | | | | | |
|----|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Okt | Nop | Des | Jan | Feb | Mar |
| 1 | Nelayan | 430 | 420 | 420 | 450 | 430 | 420 |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.

Dalam data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, Desa Merak Belantung menempati posisi teratas dalam keberadaan nelayan terdata yang tertinggi di Kecamatan Kalianda dengan jumlah 56 nelayan, disusul Desa Kalianda

dengan jumlah nelayan terdaftar 38 nelayan, dan Desa Maja dengan 34 nelayan yang terdaftar.

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (sumber daya manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam memberantas kemiskinan. Persentase tingkat pendidikan Desa Merak Belantung rata-rata berpendidikan SD atau sederajat sampai SMA atau sederajat.

Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Merak Belantung tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Merak Belantung baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 6 tahun (SD), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas yang terdekat berada di kabupaten kecamatan.

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat untuk berkelanjutan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berapa banyaknya masyarakat yang terserang oleh penyakit.

Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, stroke, diabetes, dan DBD. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang cukup berat dan memiliki waktu lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrim, pola makan yang kurang seimbang, kurang olahraga serta kurangnya pemahaman tentang budaya hidup sehat.

5. Visi dan Misi Desa Merak Belantung

Sebagaimana desa-desa yang lain, Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki visi dan misi bagi desanya. Berikut merupakan visi dan misi Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan:

a. Visi Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Yaitu: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Desa Merak Belantung yang Religius, Aman, Harmonis, Adil dan Tertib

b. Misi Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan:

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desamerak Belantung
- 2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Merata Dan Terjangkau
- 3) Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Agribisnis

c. Tujuan Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan:

- 1) Pendapatan dan Kesejahteraan Aparatur Desa

2) Jaminan Kesehatan Aparatur Desa

3) Peningkatan Pelayanan Desa

6. Program Kerja Desa Merak Belantung

Program kerja Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan meliputi sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

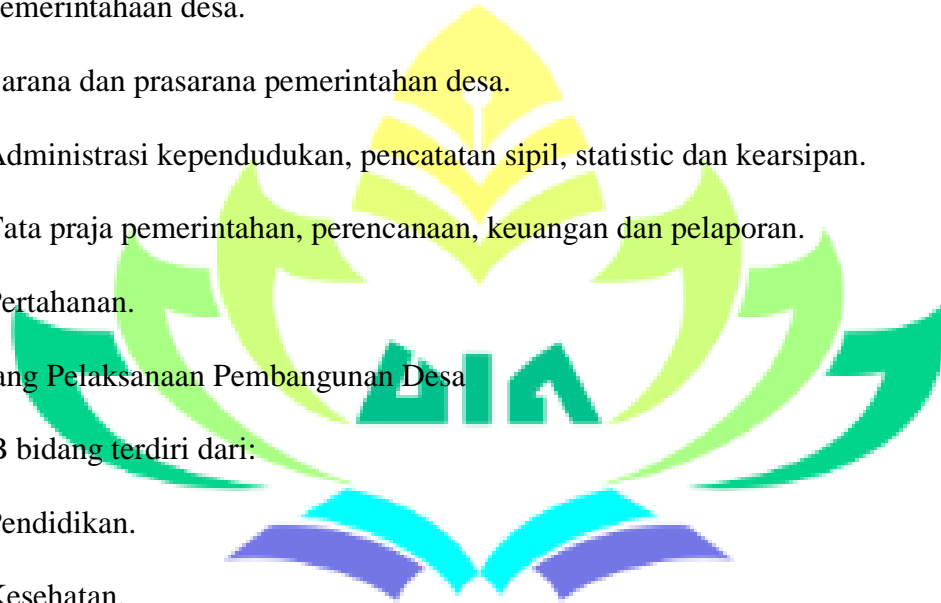
SUB bidang terdiri dari:

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan.
- 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 5) Pertahanan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

SUB bidang terdiri dari:

- 1) Pendidikan.
- 2) Kesehatan.
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 4) Kawasan pemukiman.
- 5) Kehutanan dan lingkungan hidup.
- 6) Perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- 7) Energi dan sumber daya mineral.
- 8) Pariwisata.



c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

SUB bidang terdiri dari:

- 1) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 2) Kebudayaan dan keagamaan.
- 3) Kepemudaan dan olahraga.
- 4) Kelembagaan masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

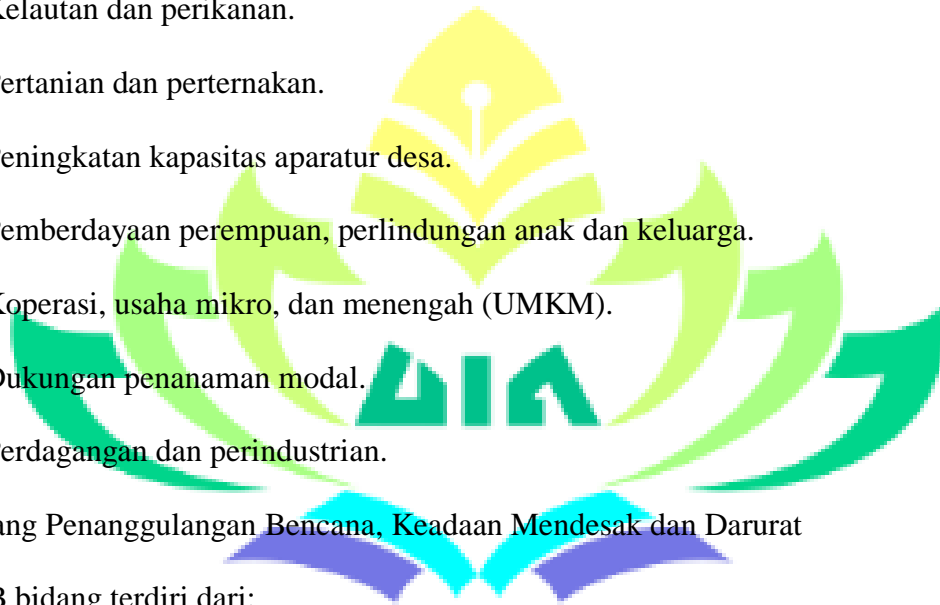
SUB bidang terdiri dari:

- 1) Kelautan dan perikanan.
- 2) Pertanian dan perternakan.
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur desa.
- 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
- 5) Koperasi, usaha mikro, dan menengah (UMKM).
- 6) Dukungan penanaman modal.
- 7) Perdagangan dan perindustrian.

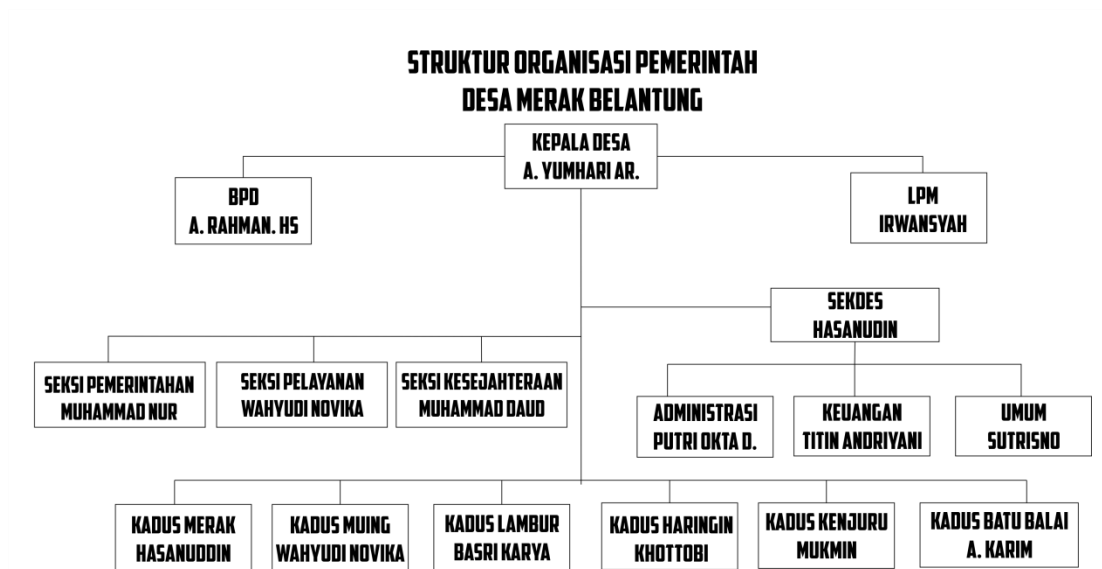
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat

SUB bidang terdiri dari:

- 1) Penanggulangan bencana.
- 2) Keadaan darurat.
- 3) Mendesak.



7. Struktur Organisasi Desa Merak Belantung



B. Praktik Jual Beli Ikan di Atas Bagan Apung di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

1. Awal mula terjadinya praktik jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan apung

Penulis tertarik melakukan penelitian Jual Beli Ikan di Atas Bagan di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan karena menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tahun per-maret 2019 yaitu keseluruhan nelayan yang terdaftar dan berada di Kecamatan Kalianda berjumlah 420 jiwa dan Desa Merak Belantung menempati tempat teratas dalam daftar jumlah nelayan yang ada di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah nelayan terdaftar yaitu 56 orang, disusul Desa Kalianda dengan jumlah terdaftar 38 orang dan Desa Maja dengan 34 orang.

Jual beli yang terjadi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan sama hal nya dengan jual beli yang terjadi di daerah lainnya, dimana dalam jual belinya terdapat akad dan unsur saling merelakan antara keduabelah pihak yang bertransaksi. Masyarakat disuguhkan banyak sekali ikan atau hasil laut yang berlimpah dari hasil tangkapan nelayan sepanjang malam dengan menjaring, memancing dan menjerat atau dengan menggunakan bagan apung.

Berlimpahnya ikan yang di dapat tidak di iringi dengan pendapatan pengelola bagan yang melau semalamann, disaat ikan sedang banyak (musim ikan) namun yang didapat oleh pengelola bagan dan dibawa kepelelangan ikan sangat minim, sementara itu pengguna bagan apung lainnya mendapatkan ikan yang lebih banyak. Banyak masyarakat dirugikan akibat adanya hal yang seperti ini terjadi, masyarakat yang hendak membeli ikan kecewa karena tidak adanya ikan yang dibawa ke pelelangan tersebut. Dan pengolahan ikan pun tidak bisa mengolah ikan menjadi ikan asin karena tidak adanya ikan yang dibawa atau dijual di pelelangan. Akibatnya proses produksi ikan asin pun terhambat. Terhambatnya proses pembuatan ikan asin dan minimnya ikan yang diperoleh membuat kelangkaan barang dan membuat perubahan harga jual atau harga beli masyarakat.

Karena banyaknya masyarakat yang dirugikan, maka dari sini lah kecurigaan bos bagan atau pemilik bagan terhadap pengelola bagan akan adanya jual beli yang dilakukan di atas bagan apung tersebut. Barang atau ikan yang di dapat oleh pengelola bagan adalah sepenuhnya milik pemilik bagan, akan tetapi pengelola bagan tersebut tidak mengatakan kepada bos bagan bahwa telah terjadi jual beli yang dilakukan di atas bagan. Jika bos bagan mengetahui adanya oknum dari pengelola

bagannya bertransaksi jual beli yang dilakukan di atas bagan maka bos tidak segan untuk langsung memecat oknum/pengelola bagan yang tidak jujur tersebut.

Awal mula terjadinya transaksi jual beli ikan di atas bagan apung tersebut adalah dikarenakan harga yang ditawarkan sangat tinggi dibandingkan dengan ketika bertransaksi jual beli di pelelangan ikan. Oleh sebab itu pengelola bagan tergiur akan tawaran ikannya untuk dibeli di atas bagan apung. Oknum tersebut menggelapkan hasil yang didapat ketika bertransaksi jual beli di atas bagan tersebut dengan cara mengatakan bahwa ia sedang tidak dapat ikan kepada bos bagan tersebut. Hasil laut yang dijual kepada pembeli yang mendatangi bagan apung cukup beragam, seperti ikan teri, cumi-cumi, dan ikan tongkol, dan harganya sangat beragam.

Akibat dari transaksi jual beli yang dilakukan di atas bagan tersebut banyak merugikan masyarakat luas khususnya bos bagan sendiri. Yang seharusnya ia mendapatkan setoran dari pengelola bagan tapi pada hari itu bos bagan tidak mendapatkan setoran yang diperoleh dari pengelola bagan tersebut, maka hal tersebut merupakan kerugian bos bagan.

Masyarakat juga terkena dampaknya yaitu pengasinan ikan, yang seharusnya pengasinan ikan bisa memproduksi ikan menjadi ikan asin lebih maksimal, tapi tidak dapat memproduksi dikarenakan minimnya ikan yang diperoleh. Masyarakat pun yang hendak mengkonsumsi ikan maka pada saat itu tidak dapat mengkonsumsi ikan dikarenakan ikan yang ada sangat minim.

2. Pendapat Para Pengelola Bagan dan Pemilik Bagan Tentang Praktik Jual Beli Ikan di Atas Bagan Apung

Data penelitian yang ditulis ini diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara langsung ke tempat terjadinya dan kepada oknum pengelola bagan atau bos bagan (pemilik bagan apung). Peneliti memilih narasumber yang berkaitan langsung dengan transaksi jual beli yang dilakukan di atas bagan apung. Yang merupakan sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini.

Berikut praktik jual beli yang dijabarkan oleh beberapa narasumber yang dipilih karena berkaitan dengan jual beli di atas bagan, bagaimana proses terjadinya dan mengapa bisa terjadi jual beli di atas bagan tersebut. Berdasarkan wawancara yang didapat sebagai berikut:

1. Menurut Bapak Santoso, ia pernah menjual ikannya ditengah laut. Sebelum pembeli datang ke bagan apung untuk membeli ikan, pihak pembeli menghubungi bapak Santoso terlebih dahulu untuk memastikan ikan yang akan dibeli tersedia untuk dibeli. Harga yang ditawarkan penjual berkisar lebih mahal Rp 30.000 sampai Rp 50.000 dari harga jual ketika menjual di pelelangan ikan. Ketika bapak santoso ditanyai mengenai izin dengan pemilik bagan terhadap dirinya yang menjual ikan tersebut, ia menyampaikan bahwasanya ia tidak memberitahu kepada pemilik bagan anak penjualan ikannya di atas bagan dengan alasan takut untuk diberhentikan atau dipecat oleh pemilik bagan.⁹⁴
2. Menurut bapak Bejo, dia tidak pernah menjual ikan di atas bagan, dan menurutnya yang ia dengar dari cerita pengelola bagan lainnya bahwa perahu milik nelayan

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Santoso (pengelola bagan) pada, 9 Maret 2019.

atau pembeli ikan itu langsung mendatangi bagan untuk membeli ikan yang ada di bagan yang di datangi oleh nelayan atau pembeli tersebut. Menurutnya apabila harga yang ditawarkan nelayan atau pembeli tersebut sama dengan harga yang ada di pelelangan atau pasar ikan maka pengelola bagan menolak untuk menjualnya kepada nelayan atau pembeli tersebut. Menurut bapak Bejo harga yang diperoleh pengelola bagan akan hasil menjualnya tersebut berkisar antara Rp 50.000 sampai Rp 100.000. menurut bapak Bejo, jikalau pengelola bagan yang menjual ikan-ikannya di atas bagan maka akan dipecat oleh pemilik bagan tersebut.⁹⁵

3. Menurut bapak Akbar, ia pernah menjual ikan di atas bagan apung dan ia memberitahu bahwasanya pihak nelayan atau pembeli tersebut mendatangi bagan-bagan yang sedang menjaring ikan. Harga yang ditawarkan nelayan kepada pengelola bagan tersebut relatif tinggi berkisar 50% sampai 100% dari harga jual ikan tersebut di pelelangan ikan atau pasar ikan. Menurutnya yang dirugikan apabila pengelola bagan menjual ikannya di atas bagan maka yang dirugikan yaitu pengasinan ikan yang ada di Desa Merak Belantung tersebut. Kalau pemilik bagan tahu akan pengelola bagannya menjual ikan di atas bagan maka pemilik bagan tidak segan untuk memberhentikannya atau memecatnya, ujar bapak Akbar.⁹⁶

4. Menurut bapak Yusuf, ia mengaku pernah menjual ikan di atas bagan, nelayan yang hendak membeli ikan mendatangi bagan dan melakukan transaksi tersebut. Nelayan tersebut telah memodifikasi perahunya dengan menambahkan kompor tungku untuk merebus ikan agar dijadikan ikan asin pada waktu yang sama setelah

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Bejo (pengelola bagan) pada, 12 Maret 2019.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Akbar (pengelola bagan) pada, 16 Maret 2019.

pihak nelayan tersebut membeli ikan dari pengelola bagan tersebut, karena menurut bapak Yusuf, apabila ikan yang direbus itu keadaan masih segar maka hasil ikan asinnya pun akan bagus. Mengenai masalah harga yang ditawarkan nelayan kepada pengelola bagan menurut bapak Yusuf harga yang ditawarkan nelayan kepada pengelola bagan relatif besar mencapai Rp 50.000 dari harga yang dijual di pelelangan ikan. Menurut bapak Yusuf, terkadang pemilik bagan hanya memberikan nasihat saja kepada pengelola bagan dan berujung pemecatan.⁹⁷

5. Menurut bapak Junaidi, ia mengaku pernah menjual ikan atau hasil lautnya di atas bagan apung. Ia menceritakan bahwa nelayan atau pembeli mendatangi bagan apungnya menggunakan kapal laut dan langsung melakukan transaksi jual beli tersebut. Menurutnya sangat untung ketika menjual ikan di atas bagan, tidak sampai menunggu pagi datang ikan sudah habis karena dibeli oleh nelayan atau pembeli ikan tersebut, selisih harga yang didapat ketika menjual ikannya di atas bagan yaitu mencapai Rp 30.000 sampai Rp 40.000. menurutnya ia pernah ketahuan oleh pemilik bagan tentang menjual ikan di atas bagan itu, dan ia hampir dipecat atau diberhentikan, namun ia masih dapat berkerja dan takut untuk mengulangi perbuatannya lagi.⁹⁸

6. Menurut bapak Kadir, ia mengaku tidak pernah. Menurutnya nelayan atau pihak pembeli itu mendatangi bagan apung dan langsung melakukan transaksi jual beli tersebut. Menurut bapak Kadir nelayan-nelayan tersebut berasal dari Pulau Pasaran, Teluk Betung dan Desa Rangai. Menurutnya terdapat oknum pengelola

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Yusuf (pengelola bagan) pada, 17 Maret 2019.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Junaidi (pengelola bagan) pada, 24 Maret 2019.

bagan yang tidak jujur, ketika di atas bagan ia mendapatkan 10 bakul ikan lalu oknum tersebut menjualnya dan mengatakan kepada pemilik bagan bahwasanya oknum tersebut hanya mendapatkan 3 bakul ikan saja. Kisaran harganya antara 50% sampai 100% dengan harga jual yang ada di pelelangan ikan atau pasar ikan.⁹⁹

7. Menurut bapak Yani sebagai pemilik bagan apung, menurutnya ada yang bercerita mengenai pengelola bagannya yang menjual hasil laut atau ikannya di atas bagan, namun bapak Yani tidak mendapatkan bukti yang jelas untuk memberhentikan pengelola bagannya yang tidak bertanggung jawab tersebut. Menurut bapak Yani apabila ia mendapatkan bukti bahwa pengelola bagannya menjual ikan di atas bagan tersebut maka ia akan langsung memecatnya, karena menurutnya pengelola bagan tersebut sudah merugikan pemilik bagan. Ketika bapak Yani ditanyai mengenai *thalaqi al-ruqban*, ia menjawab bahwasannya ia tidak mengetahui tentang hal itu.¹⁰⁰

8. Menurut bapak Busa sebagai pemilik bagan apung, menurutnya apabila ada pengelola bagannya yang menjual ikannya di atas bagan maka ia langsung untuk memberhentikannya atau memecatnya, karena perbuatan seperti itu sangat merugikan pemilik bagan dan pengasinan ikan yang ada di Desa Merak Belantung. Menurut bapak Busa apabila ia membiarkan perilaku pengelola bagannya melakukan hal seperti itu terus maka ia akan terus merugi. Ketika ia ditanyakan

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Kadir (pengelola bagan) pada, 24 Maret 2019.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Yani (pemilik bagan) pada, 22 Maret 2019.

mengenai *thalaqi al-ruqban*, maka ia menjawab tidak mengetahui tentang *thalaqi al-ruqban* itu.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan yang terdapat di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yaitu para pembeli yang asalnya dari luar Desa Merak Belantung seperti, dari kelompok nelayan Pulau Pasaran, Teluk Betung dan Desa Rangai berbondong-bondong mendatangi bagan apung tersebut, dengan maksud dan tujuan untuk membeli ikan yang didapat oleh pengelola bagan apung.¹⁰²

Tujuan para nelayan itu membeli ikan di atas bagan apung tersebut dikarenakan ikan yang dibeli masih sangat segar dan baru diangkat dari jaring bagan apung tersebut. Semakin segar ikan yang direbus untuk dijadikan ikan asin maka semakin baik kualitas ikan tersebut. Kapal laut yang digunakan nelayan asal Pulau Pasaran dan nelayan asal Rangai tersebut telah disediakan untuk pengolahan ikan asin, supaya ketika mereka membeli ikan ditengah laut pada malam hari itu langsung melakukan produksi ikan asin berupa dengan cara merebus ikan dan melakukan penambahan garam pada ikan.¹⁰³

Akibat adanya nelayan (pelele) yang berasal dari Pulau Pasaran dan Rangai yang mencari ikan untuk dibeli pada malam itu juga, maka tidak sedikit dari pengelola bagan yang tergiur akan kehadiran para nelayan itu, bahkan terkadang

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Busa (pemilik bagan) pada, 23 Maret 2019.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Yusuf, *Op.Cit.*

pengelola bagan-pun sampai menghubungi pihak nelayan tersebut supaya ikan yang didapat pengelola bagan dapat dibeli oleh para nelayan tersebut.

Tergiurnya pengelola bagan akan adanya nelayan yang hendak membeli ikan tersebut dikarenakan harga yang ditawarkan nelayan asal Pulau Pasaran dan Rangai sangat menggiurkan. Dibandingkan dengan harga ketika menjual ikan di pelelangan ikan Desa Merak Belantung, harganya bisa mencapai setengah dari harga yang di jual di pelelangan ikan Desa Merak Belantung.¹⁰⁴

Tidak sedikit yang menggelapkan hasil penjualan yang dilakukan pengelola bagan yang menjual ikannya di atas bagan kepada bos bagannya. Ketika mendapatkan 10 bakul ikan, namun pengelola bagan mengatakan kepada bos bagan hanya mendapatkan 3 atau 4 bakul yang untuk dijual di pelelangan ikan Desa Merak Belantung.¹⁰⁵

Akibatnya bos bagan merasa iba kepada pelele (pengolahan ikan) yang ada di Desa Merak Belantung, yang sebelumnya ada kontrak bahwasanya ikan yang didapat sepatuhnya dibeli oleh pelele tersebut. Uang tidak dapat ikan pun tidak ada seperti itulah yang dirasakan oleh bos bagan akibat adanya oknum pengelola bagan yang tidak jujur kepadanya.

Pemecatan adalah solusi terbaik yang diberikan kepada oknum-oknum pengelola bagan yang tidak jujur tersebut. Mengapa dipecat? Karena oknum tersebut telah meresahkan bahkan merugikan bos bagan dengan tidak jujur kepada bos bagan, yang penghasilan bos bagan dari bagan tersebut maka ia tidak dapat penghasilan

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Daeng Kadir, *Op.Cit.*

karena adanya oknum yang tidak jujur tersebut.¹⁰⁶ Bahkan bukan hanya bos bagan saja yang mengalami kerugian, pelele (pengasinan ikan) juga merasakan dampaknya. Tidak adanya ikan membuat produksi terhambat bahkan bisa membuat tertutupnya usaha untuk pengasinan ikan tersebut karena tidak adanya ikan untuk dijadikan ikan asin.



¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Busa, *Op.Cit.*

BAB IV

ANALISIS DATA

1. Praktik Jual Beli Ikan di Atas Bagan Apung di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan

Tentang pelaksanaan jual beli yang dilakukan di atas bagan apung yang terdapat di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Pada jual beli ini sama halnya jual beli pada umumnya masyarakat luas yang berdasarkan suka sama suka dalam tukar menukar barang dan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Namun yang membedakan jual beli ikan di Desa Merak Belantung ini adalah jual belinya yang dilakukan di atas bagan apung. Dimana pengelola bagan sebagai pihak penjual dan nelayan yang datang menghampiri bagan apung sebagai pembeli. Kemudian transaksi dilangsungkan di atas bagan apung tersebut, dengan akad yang jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Proses jual beli tersebut berlangsung lancar. Pihak nelayan atau pembeli pun langsung berakad dengan jelas dan dapat diterima penjual, kemudian pembeli memberikan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak penjual sesuai akad yang disepakati lalu kemudian nelayan mengambil barang tersebut yang berupa ikan segar untuk langsung diproses untuk pengasinan ikan yang ada pada perahu nelayan tersebut. Ikan yang segar adalah alasan utama nelayan membeli ikan tersebut.

Jual beli yang dilakukan di atas bagan tersebut dilakukan si penjual sebelum menepi ke pelelangan ikan yang ada di Desa Merak Belantung, jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli terjadi sebelum sampai di pasar atau dilakukan secara

mencegat pihak penjual oleh sang pembeli ikan tersebut. Harga yang ditawarkan oleh pembeli kepada penjual di atas bagan apung tersebut cukup beragam sampai harganya mencapai setengah harga lebih mahal dengan harga jual yang ada dipelelangan ikan Desa Merak Belantung.

Dalam melakukan jual beli dan dalam bertransaksi harus terpenuhi rukun dan syaratnya jual beli. Ijab, qabul dan objek merupakan unsur dari rukun jual beli yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Jual beli yang dilakukan di atas bagan apung di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam jual beli ikan melakukan ijab dan qabul secara lisan dan jelas dan objek akad berupa ikan tersebut dapat diterima oleh penjual dan pembeli yang bertransaksi di atas bagan apung dengan tidak adanya paksaan antara keduanya. Oleh karena itu dalam jual beli yang dilakukan di atas bagan apung tersebut tidak bertentangan dengan rukun jual beli.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan yang Dilakukan di Atas Bagan Apung di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan

Dalam Islam jual beli tidak akan dilarang jika telah memenuhi rukun dan syarat. Apabila jual beli tersebut terlihat tidak memenuhi rukun dan syarat maka jual beli tersebut bisa batal atau dilarang karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam bertransaksi. Terpenuhinya rukun dan syarat agar membuat jual beli tersebut terlepas dari unsur keterpaksaan dan dapat mencapai tujuan jual beli yaitu berdasarkan suka sama suka dalam tukar menukar barang dan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam jual beli yang dilakukan di atas bagan apung di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, tidak terpenuhi syarat jual beli karena barang yang dijual tidak sepenuhnya milik penjual akan tetapi barang tersebut masih terdapat tanggung jawab bos bagan. Sejatinya pengelola bagan hanya berkerja untuk mendapatkan ikan dengan cara menjaring ikan dengan bagan apung sedangkan jual menjual barang atau ikan tersebut adalah wewenang dari bos bagan. Maka dari itu tidak terpenuhinya syarat jual beli. Ulama Hambaliyah mengatakan bahwa dipandang tidak sah jual beli *fudhul* yakni menjual barang tanpa seiring pemiliknya dan juga termasuk penggelapan atau menjual barang curian yang dilakukan oleh pengelola bagan hasil transaksi yang dilakukan di atas bagan kepada bos bagan.

Terdapat unsur penggelapan atau disebut *ghulul* lebih tepatnya menjual barang curian yang dilakukan oleh pengelola bagan apung kepada bos bagan. Barang atau ikan yang dijual oleh pengelola bagan adalah sepenuhnya milik dari pemilik bagan, apabila pengelola bagan menjual barang atau ikan milik pemilik bagan dengan cara tidak memberitahu pemilik bagan tersebut maka jual beli tersebut merupakan jual beli dengan cara mencuri ikan pemilik bagan atau disebut dengan penggelapan atau *ghulul* atau lebih tepatnya menjual barang curian. Keuntungan yang besar dari hasil curian atau penggelapan uang tersebut hanya dinikmati oleh pengelola bagan yang tidak jujur tersebut. Dalam hukum Islam melarang adanya *ghulul* atau korupsi karena dapat merusak kemaslahatan yang ingin dicapai. Oleh karena itu hukum Islam melarang keras adanya penggelapan uang yang dilakukan pengelola bagan kepada bos bagan tersebut.

Ditinjau dalam hukum Islam, maka jual beli yang dilakukan di atas bagan apung di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan termasuk dari jual beli *thalaqi al-ruqban*, karena pada transaksi yang dilakukan di atas bagan apung tersebut dilakukan dengan cara mencegat, dalam artian pihak penjual atau pengelola bagan mendapatkan ikan dengan tujuan untuk menjualnya di pelelangan ikan, sedangkan nelayan yang akan membeli ikannya dengan cara mendatangi pengelola bagan sebelum ia sampai di pelelangan atau pasar ikan Desa Merak Belantung, supaya nelayan tersebut bisa mendapatkan ikan yang lebih segar untuk langsung diproduksi di atas perahu nelayan tersebut. Jual beli ini terlarang berdasarkan hadis:

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَجَشَّوْا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ... (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. berkata “janganlah kamu menghadang pedagang dari desa, jangan sebagian kamu terhadap yang lainnya melakukan an-najasy (jual beli dengan tujuan merusak dagangan orang lain, menawarkan barang untuk menjerumuskan orang lain), dan janganlah orang kota menjualkan dagangan orang desa”. (HR. Bukhari)

Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhum pernah ditanya tentang maksud dari sabda beliau, “Orang kota menjualkan barang untuk orang desa,” lalu ia menjawab, “Janganlah orang kota menjadi makelar (perantara) bagi orang desa.”. Hikmah dari larangan tersebut karena adanya mudharat (kejelekan) dan akan menimpa penduduk suatu tempat serta akan bertambahnya harga atas mereka. Jual beli ini hukumnya tidak sah. Adapun, dimungkinkan orang kota memborong dengan harga murah yang

menyebabkan kerugian. Terdampak monopoli yang dilakukan orang kota kepada orang desa karena dia (orang kota) menguasainya maka ia akan menambahkan harga seenak hatinya, maka menyebabkan terjadinya perubahan harga atau merusak harga pasar. Kemudian, mengabaikan harga pasar yang berdampak serius berupa kerusakan ekonomi.

Menurut penulis, jual beli yang dilakukan dengan cara mencegat adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang oleh pembeli yang mana pedagang atau pengelola bagan tersebut belum sampai di pasar ikan atau pelelangan. Unsur mencegat dalam jual beli ini adalah karena pembeli membeli ikan tersebut belum sampai di pelelangan ikan dengan harga yang berbeda dengan harga yang ada di pasar ikan atau pelelangan. Terlarangnya jual beli.

Terlarangnya jual beli yang dilakukan sebelum sampai di pasar dikuatkan dengan adanya Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dalam Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, “setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjualbelikan secara lelang di tempat pelelangan ikan”.

Dalam praktiknya jual beli yang dilakukan di atas bagan apung tersebut belum memenuhi syarat sah nya jual beli karena objek dalam jual beli tersebut wewenang pemilik bagan apung. Dalam kasus ini merupakan tidak terpenuhinya syarat jual beli, pengelola bagan apung diminta untuk melakukan pengoperasian bagan apung yang ia tempati dan juga pengelola menjual hasil bagannya di atas bagan tanpa memberitahu bos bagan terdahulu. Keuntungannya pun diambil oleh pengelola bagan dengan

alasan bahwa ia tidak mendapatkan hasil, ini merupakan suatu penggelapan atau perbuatan *ghulul* yang dilakukan pengelola kepada bos bagan.

Jadi menurut penulis transaksi jual beli yang dilakukan di atas bagan di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan hukumnya adalah tidak diperbolehkan atau dilarang dan harus dihentikan karena mengandung kemudhorotan, karena dalam kaidah ilmu fiqh mengatakan bahwa “kemudhorotan itu harus dihilangkan”, karena dari jual beli yang dilakukan di atas bagan tidak menguntungkan pemilik bagan melainkan merugikan pemilik bagan karena ulah pengelola bagannya yang tidak jujur dengan melakukan perbuatan *ghulul* yang menggelapkan hasil penjualan ikan dari bagan apung tersebut. Jual beli tidak diperbolehkan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sah jual beli, karena barang yang dijual itu kewenangan pemilik bagan apung. Jual beli yang dilakukan di atas bagan apung di Desa Merak Belantung termasuk jual beli *thalaqi al-ruqban*, karena dilakukan dengan cara mencegat penjual yang dilakukan oleh pembeli yang terjadi sebelum sampai di pasar ikan atau di pelelangan ikan yang dapat merusak harga yang ada di pasar dan juga terlarang karena adanya PERDA Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dalam Pasal 4 ayat 1, maka jual beli ikan yang dilakukan di atas bagan di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tersebut terlarang atau tidak diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli yang terjadi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan sebuah praktik jual beli ikan atau hasil laut, dalam praktiknya transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli sebelum sampai di pelelangan ikan atau pasar ikan. Pengelola bagan menjual ikan atau hasil lautnya dengan cara didatangi oleh nelayan-nelayan yang rata-rata berasal dari Pulau Pasaran, Teluk Betung dan Desa Rangai. Harga yang dipatok nelayan kepada pengelola bagan lebih mahal dari harga normal yang ada di pelelangan ikan atau pasar ikan. Nelayan-nelayan tersebut mendapatkan ikan yang lebih segar dari yang dibeli pada saat di pelelangan ikan atau pasar ikan. Didalam transaksi tersebut terdapat adanya perbuatan ghulul atau penggelapan yang dilakukan oleh pengelola bagan terhadap bos atau pemilik bagan apung tersebut. Jual beli yang dilakukan sebelum sampai pasar merupakan perbuatan yang menyalahi aturan dengan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2017.
2. Menurut hukum Islam tentang jual beli yang dilakukan di atas bagan apung di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan termasuk dari jual beli yang dilarang atau termasuk dari jual beli *thalaqi al-ruqban*, yang jual belinya dilakukan dengan cara mencegat pihak penjual yang belum sampai ke pasar. Selain itu penjual didatangi oleh pembeli ketika masih di bagan apung yang belum sampai pasar ikan atau pelelangan ikan Desa

Merak Belantung. Dalam memenuhi syarat jual beli, dalam jual beli yang dilakukan di atas bagan apung termasuk dari jual beli *fudhul* karena objek akad yang dijual oleh penjual merupakan wewenang pemilik bagan dan jual beli yang dilakukan di atas bagan di Desa Merak Belantung merupakan jual beli yang mengandung kemudhorotan dan harus dihentikan karena terdapat unsur penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh pengelola bagan apung terhadap bos bagan apung. Maka jual beli ini tidak diperbolehkan atau dilarang.

B. Saran

1. Bagi pengelola bagan apung atau penjual, seharusnya terjalin keterbukaan antara pengelola bagan dan pemilik bagan, agar terjalin suatu keharmonisan dalam berkerja. Sikap jujur adalah yang terpenting dalam dunia kerja dan khususnya pada pengelolaan bagan apung.
2. Bagi pengelola bagan apung atau penjual, seharusnya menanamkan dalam dirinya untuk komitmen untuk menjual hasil bagan apungnya hanya di pasar ikan atau pelelangan ikan
3. Bagi pengelola bagan apung atau penjual seharusnya menjalin komunikasi dengan pemilik atau bos bagan, dan pengasinan ikan yang ada di Desa Merak Belantung. Agar ikan yang ada dibagan apung tidak dijual kepada nelayan yang lainnya dan bisa diproduksi oleh pengasinan yang dipercayai oleh pemilik bagan saja.
4. Bagi pemilik bagan atau bos bagan, seharusnya lebih menseleksi orang-orang yang dipercayai sebagai pengelola bagan apung terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhar, M. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Jabal.
- An-Na'im, A. A. (2009). *Epistimologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Edisi Revisi IV*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ash-Shabib, M. (2015). *Al-Quran dan Terjemahan Rasm Utsmani*. Depok: Hilal Media.
- Buchari Alma, D. J. (2014). *Menejemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Prena Media Group.
- Chaudhry, M. S. (2015). *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Daniel, M. (2005). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Isnaini Harahap, Y. S. (2015). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Karim, A. A. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Mardani. (1015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nurul Huda, M. H. (2015). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Oni Sahroni, M. H. (2016). *Fiqh Muamalah Dinamika Teori, Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rasjid, S. (2008). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rozalinda. (2017). *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2015). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Suryabrata, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tika, M. P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Internet:
- Laut, Duta. "Bagan Apung", tersedia di
<http://dutalaut.blogspot.com/2016/03/bagan-apung.html>

(diakses pada 7 Oktober 2018, Pukul 19:12 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Jurnal:

Efa Rodiah Nur, "*Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*", Jurnal Al-Adalah, Vol.XII No.3, 2015, h. 656. (Online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390> (diakses 27 Juni 2019 pukul 09:27 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

